BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung, Kota Bandung dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten berdiri. Kabupaten berdiri sejak sekitar pertengahan abad ke- 17 Masehi, dengan Bupati pertama Tumenggung Wiraangunangun. Ia memerintah Kabupaten Bandung yang beribukota di Krapyak atau Bojong Asih (sekarang Dayeuh Kolot), kira-kira 11 km kearah selatan pusat Kota Bandung sekarang. Ditempat itu pemerintah Kabupaten Kota Bandung berlangsung hingga awal abad ke-19. Bupati yang memerintah kabupaten di Krapyak berjumlah 6 orang secara turun temurun yaitu, Tumenggung Wiraangunangun (hingga tahu 1681), Tumenggung Ardi Kusumah (1681-1704), Tumenggung Anggadiredja I (1704-1747), Demang Natapradja bergelar Tumenggung Anggadiredja II (1714-1763), Tumenggung Anggadiredja III alias R.A Wiranatakusumah I (1763-1794), dan R.A Wiranatakusumah II (1794-1829). *(Volks Almanak Soenda 1922 dan Encyclopaedie Van Nederlandsch – Indie 1927 : 355-358).*

Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh A Wiranatakusumah II atau pada akhir 1799 kekuasaan kompeni di Nusantar berakhir sebagai akibat *VOC* bangkrut, kekuasaan di Nusantara diambil alih pemerintah kerajaan Belanda yang waktu itu dikuasai oleh Francis. Pemerintahan di Nusantara dilaksanakan oleh perwkilan kerajaan Belanda dengan nama Pemerintahan Hindia Belanda

dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal pertama yaitu Herman Willem Daendels (1808-1811). Tugas utama Daendels adalah mempertahankan pulau jawa dari kemungkinan serangan pasukan Inggris yang waktu itu telah menduduki India. Untuk kepentingan tugasnya itu Daendles membangun Jalan Raya Pos (*De Grote Postweg*) dari Anyer di ujung Jawa Barat hingga Panarukan di ujung Jawa Timur (1000 Km), pembangunan itu dilakukan oleh rakyat dengan kerja rodi (kerja paksa).

Di daerah Priangan jalan raya pos mulai dibangun pertengahan 1808 dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang sudah ada di daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Parayakan Muncang, ternyata daerah itu berjauhan dengan Ibukota Kabupaten. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya dan agar pejabat pemerintahan kolonial Belanda mudah mendatangani kantor Bupati, Daendels melalui suratnya tanggal 25 Mei 1810 meminta kepada kedua Bupati yang bersangkutan agar memindahkan Ibukota Parakan Muncang ke Andawak (daerah Tanjungsari sekarang).

Rupanya Daendels tidak mengetahui bahwa jauh sebelum surat itu keluar Bupati Bandung sudah merencanakan memindahkan Ibukota Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan yang terletak di tepi selatan jalan raya pos yang sedang dibangun. Alasan pemindahan Ibukota itu karena Krapyak tidak strategis sebagai pusat pemerintahan, karena terletak disisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808 atau awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyat pindah dari Krpyak mendekati lahan bakal Ibukota baru. Mula-mula Bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti sekarang) kemudian pindah ke Balubur hilir agar lebih dekat ke tempat pekerjaan untuk memimpin sejumlah ideyatoya membangun "kota". Namun Balubur Hilir pun dirasakan masih cukup jauh dari sungai Cikapundung, maka Bupati pindah lagi ke Kampung Bogor (Kebon Kawung pada lahan Gedung Pakuan sekarang).

Tidak diketahui secara pasti berapa lama Kota Bandung di bangun akan tetapi itu di bangun bukan atas prakarsa Daendels melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu dipimpin langsung oleh Bupati. Dengan kata lain Bupati RA Wiranatakusumah II adalah pendiri Kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai Ibukota baru Kabupaten dengan Belsuit (surat keputusan) tanggal 25 September 1810 dapat dipertanggungjawabkan Validitasnya sebagai "Hari Jadi Kota Bandung".

Tanggal hari jadi Kota Bandung telah disahkan oleh DPRD Kota Bandung dalam Perda (Peraturan Daerah) No.35 Tahun 1998 dengan demikian tanggal 1 April yang beberapa tahun lamanya (sebelum tahun 1998) biasa diperingati sebagai hari ulang tahun Kota Bandung bukan lagi sebagai hari jadi Kota Bandung, karena tanggal 1 April 1906 ternyata adalah tanggal pembentukan *Gemeente* Bandung (sekarang Pemerintahan Kota Bandung).

Sejak Kota Bandung berdiri hingga pertengahan tahun 1864, Kota Bandung hanya berfungsi sebagai Ibukota Kabupaten. Kota itu sepenuhnya diperintah oleh RA Wiranatakusumah II dan dilanjutkan oleh RA Wiranatakusumah III (1829-1846) dan RA Wiranatakusumah IV tepatnya tanggal 7 Agustus 1846. Kota Bandung juga berfungsi sebagai Ibukota Karesidenan Priangan menggantikan Kota Cianjur yang rusak berat akibat meletusnya Gunung Gede. Dengan demikian, sejak itu di Kota Bandung terjadi dualisme pemerintahan, yakni berlangsung Pemerintahan Kabupaten (Pemerintah Tradisional) dan Pemerintahan Karesidenan (Pemerintah Kolonial), hal ini berlangsung sampai Kota Bandung menjadi kota berpemerintahan otonom yang disebut *Gemeente* (1 April 1906).

Gemeente Bandung dibentuk pada waktu Kabupaten Bandung diperintah oleh Bupati ke-10 yaitu R.A.A Martanegara (1893-1918) pengganti Bupati R.A Kusuma Dilaga (1874-1893). Dengan berdirinya daerah *Gemeente* sebagai pemerintahan yang bersifat otonom, lebih dominan dari pada kedua pemerintahan lain di Kota Bandung. Pengelolaan kota sepenuhnya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah *Gemeente*, namun dalam prakteknya Bupati tetap turut berperan dalam kapasitas sebagai anggota dewan kota (*Gemeente* Road).

Sejak tanggal 1 Oktober 1962 sebutan *Gemeente* berubah menjadi *Stads Gemeente* yang berlangsung hingga akhir pemerintahan Hindia-Belanda pada masa pandudukan Jepang (Maret 1924- 14 Agustus 1945)

pemerintahan Kota Bandung disebut Bandung Shi. Pada masa kemerdekaan, sebutan Kota Bandung berubah-ubah sebagai berikut:

a. **Haminte Bandung**

   Dari 24 April 1948- 11 Maret 1950 (masa Negara Pasundan dibawah RIS)

b. **Kota Besar Bandung**

   Sejak 15 Agustus 1945

c. **Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung**

   Berdasarkan UU No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah hingga tahun 1998.

d. **Pemerintah Kota Bandung**

   Sejak tahun 1999- sampai sekarang

Berikut nama-nama Walikota Bandung dari tahun 1906 sampai sekarang:

Tabel 1.1

Walikota Bandung Tahun 1906-Sekarang

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	E.A. Maurenbrecher (exoffcio)	1906-1907
2	R.E Krijboom (exoffcio)	1907-1908
3	J.A. Van Der Ent (Exofficio)	1909-1910
4	J.J. Verwijk (exofficio)	1910-1912

5	C.C.B. van Vlenier (exofficio)	1912-1913
6	B. van Bijveld (exofficio)	1913-1920
7	B. Coops	1920-1921
8	S.A. Reitsma	1921-1928
9	B. Coops	1928-1934
10	Ir. J.E.A. van Volsogen Kuhr	1934-1936
11	Mr. J.M Wesselink	1936-1941
12	R.A Atmadinata	1941-1945
13	R. Syamsoerizal	1945-1947
14	Ir. Oekar Bratakkoesoemah	1947-1949
15	R. Enoch	1949-1957
16	R. Prinata Kusumah	1957-1966
17	R. Didi Djukardi	1966-1968
18	R. Hidayat Sukarmadidjaja	1968-1970
19	R. Otje Djoendjoenan Setiakusumah	1971-1976
20	H. Utju Djoenaedi	1976-1978
21	R. Husen Wangsaatmadja	1978-1983
22	H. Ateng Wahyudi	1983--1993

23	H. Wahyu Hamidja	1993-1998
24	H. Aa Tarmana	1998-2003
25	H. Dada Rosada .SH. Msi	2003-sekarang

Sumber : www.bandung.go.id 2011

1.2 Lambang dan Bendera Kota Bandung

Sebagai salah satu bentuk identitas sebuah perusahaan diperlukan sebuah logo. Demikian juga dengan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki lambang. Gambar logo Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat di gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1

LAMBANG PEMERINTAH KOTA BANDUNG

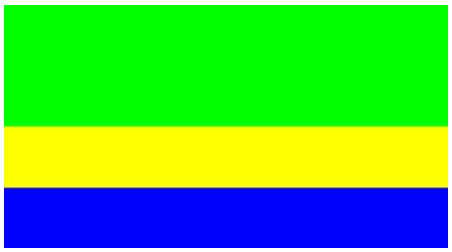


Sumber : Buku Selayang Pandang Bandung Bermartabat, 2004

Selain logo/lambang, Pemerintah Kota Bandung juga memiliki identitas lain yaitu dalam bentuk Bendera. Bendera Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat di gambar 1.2 berikut :

Gambar 1.2

BENDERA PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG



Sumber : Buku Selayang Pandang Bandung Bermartabat, 2004

1.2.1 Arti Lambang Kota Bandung

Lambang merupakan salah satu bentuk identitas dari sebuah perusahaan, demikian juga dengan Pemerintah Kota Bandung. Lambang Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Besa Bandung tahun 1953, tertanggal 8 Juni 1953, yang diijinkan dengan Keputusan Presiden tertanggal 28 April 1953 No. 104 dan diundangkan dalam berita Provinsi Jawa Barat tertanggal 29 Agustus 1954 No. 4 Lampiran No. 6 Lambang tersebut bertokoh PERISAI yang berbentuk JANTUNG. Perisai tersebut terbagi dalam dua bagian oleh sebuah BALOK-LINTANG mendatar bertajuk empat buah, yang berwarna HITAM dengan pelisir berwarna PUTIH (PERAK) pada pinggir sebelah atasnya.

1. Bagian Atas Latar KUNING (EMAS) dengan lukisan sebuah GUNUNG berwarna HIJAU yang bertumpu pada BALOK-LINTANG DARATAN
2. Bagian bawah latar PUTIH (PERAK) dengan lukisan empat bidang jalur mendatar berombak yang berwarna BIRU.

Di bawah perisai itu terlukis sehelai PITA berwarna KUNING (EMAS) yang melambai pada kedua ujungnya, pada pita itu tertulis dengan huruf-huruf besar latin berwarna HITAM amsal dalam bahasa KAWI, yang berbunyi GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

Sebagai tokoh lambang itu diambil bentuk **perisai** atau **tameng** yang dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai senjata dalam perjuangan untuk mencapai sesuatu tujuan dengan melindungi diri. Perkakas perjuangan yang demikian itu dijadikan lambing yang mempunyai arti menahan segala mara bahaya dan kesukaran. Bentuk ini sesuai dengan bentuk lambang Negara, dengan persesuaian dimaksudkan untuk melambangkan kesatuan. Warna-warna yang dipergunakan untuk pelbagai lukisan pada perisai itu mempunyai arti yang dalam dan lazim dipakai diseluruh dunia untuk membuat lambang-lambang sehingga *Heraldish* dapat dipertanggung jawabkan. Arti warna-warna tersebut adalah :

- ❖ Kuning (Emas) :Kesejahteraan, keluhungan
- ❖ Hitam (Sabel) :Kokoh, Tegak, Kuat
- ❖ Hijau (Sinopel) :Kemakmuran, Sejuk
- ❖ Putih (Perak) :Kesucian
- ❖ Biru (Azuur) :Kesetiaan
- ❖ Gemah Ripah Wibawa Mukti :Tanah Subur, rakyat makmur

Segala sesuatu mmperlambangkan Kota Bandung yang terletak pada **suatu tanah datar** yang subur dan makmur dengan iklim yang sejuk, yang dapat menyehatkan jasmani dan rohani, dikelilingi oleh suatu rangkaian gunung-gunung dan bukit-bukit dalam mana Gunung Tangkuban Perahu mengambil peranan yang penting, dengan pemandangan alamnya yang indah dan permai.

1.2.2 Arti Bendera Kota Bandung

Bendera yang digunakan oleh Kotamadya Bandung adalah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandung tanggal 8 Juni 1953 No. 9938/53.

Bentuk bendera tersebut adalah seperti yang tercantum pada diktum keputusan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Bendera yang dipergunakan oleh Kota Besar Bandung terdiri dan tiga bidang jalur mendatar, masing-masing berturut-turut dari atas berwarna hijau, kuning, biru.
b. Perbandingan-perbandingan antara lebarnya dari jalur-jalur tersebut dibawah huruf A urutan dari atas kebawah adalah 2 : 1 : 2.
c. Perbandingan antara panjang dan lebarnya berbeda yaitu 7 : 5.

1.3 Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika

BAKOMINFO (Badan Komunikasi dan Informatika) Kota Bandung merupakan Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 4 Desember 2007 serta merupakan penggabungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu Dinas Informasi dan Komunikasi dengan kantor pengolahan Data Elektronik (KPDE). Dengan demikian Bakominfo berdiri sejak diberlakukannya PERDA Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Dengan diterbitkan dan berlakunya Perda Kota Bandung Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009

Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bandung Tanggal 7 Agustus 2009, maka Badan Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung.

1.4 Visi dan Misi DISKOMINFO

1.4.1 Visi Dinas Komunikasi dan Informatika

"terwujudnya efektivitas dan efisiensi komunikasi dan informatika peneyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kota Bandung sebagai kota jasa **bermartabat".**

1.4.2 Misi Dinas Komunikasi dan Informatika

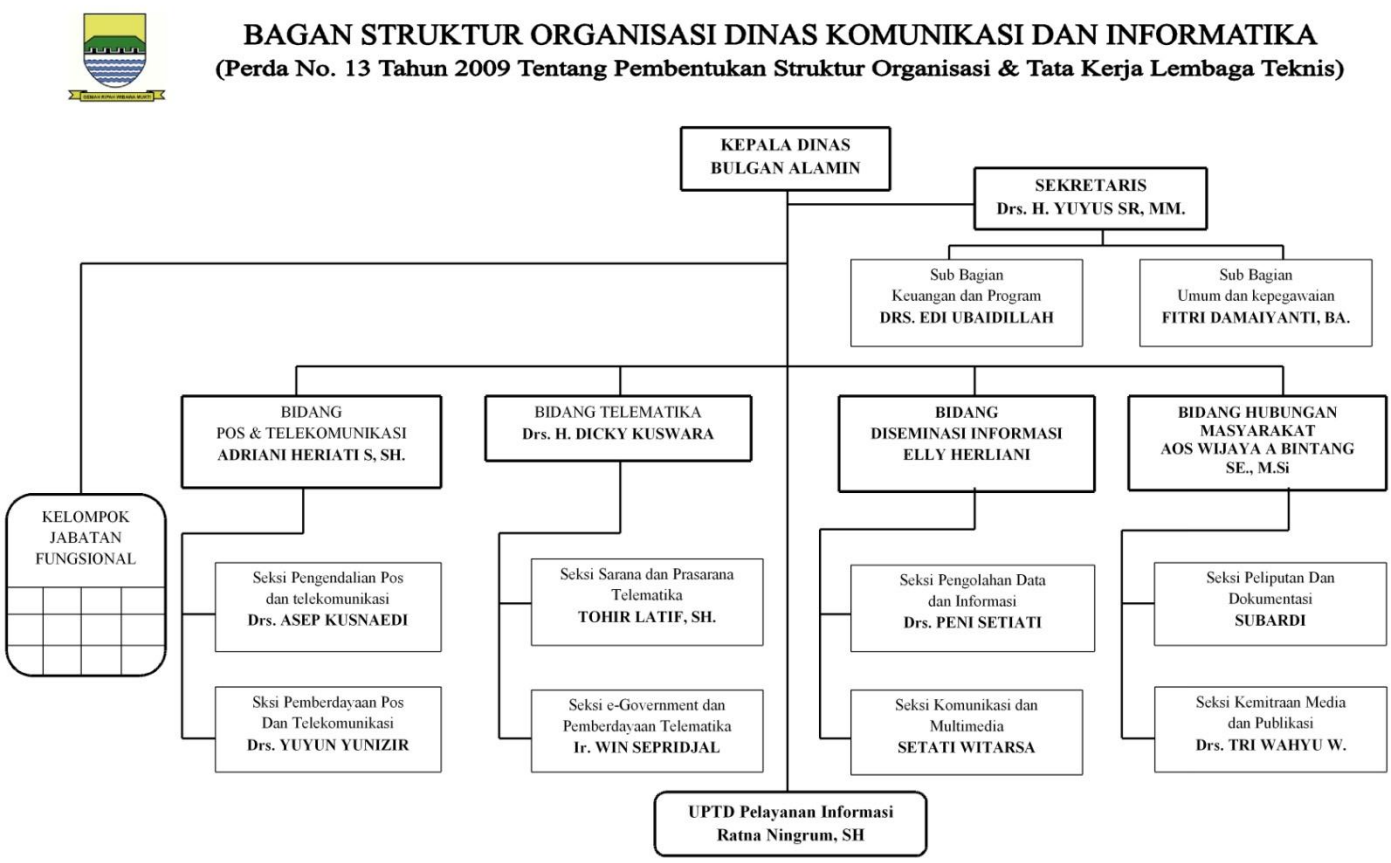
1. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan, pemberdayaan, dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika;
2. Meningkatkan layanan public dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan komunitas dialogis;
3. Meningkatkan pelayanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan kerjasama, kemitraan dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat;

5. Mendorong peran media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab;
6. Meningkatkan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang handal.

1.5 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berikut ini bagan Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung :

Gambar 1.3



Dalam menunjang kelancaran Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung maka diperlukan suatu struktur organisasi.

Seperti yang tertulis pada perda Kota Bandung No. 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Bandung :

A. Kepala Dinas
B. Sekretariat membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan dan Program
C. Bidang Pos dan Telekomunikasi yang membawahi:
    1. Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi
    2. Seksi Pemberdayaan dan Telekomunikasi
D. Bidang Telematika yang membawahi:
    1. Seksi sarana dan prasarana Telematika,
    2. Seksi *e-government* dan pemberdayaan telematika.
E. Bidang Diseminasi Informasi yang membawahi:
    1. Seksi pengolahan data dan Informasi
    2. Seksi komunikasi dan multimedia.
F. Bidang Hubungan Masyarakat, membawahi :
    1. Seksi peliputan dan dokumentasi
    2. Seksi kemitraan media dan publikasi.
G. Unit pelaksana teknis dinas

H. Kelompok Jabatan Fungsi Sosial

1.6 Job Description

A. Kepala Seksi Peliputan dan Dokumentasi

a. Uraian tugas seksi peliputan dan dokumentasi yaitu :

1. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja dibidang peliputan dan dokumentasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
3. Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan rencana dan program sebagai bahan untuk penyempurnaan hasil kerja dan sebagai bahan penilaian kinerja bawahan.
4. Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan peliputan dan dokumentasi.
5. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peantauan dan evaluasi pelaksanaan peliputan dan dokumen.
6. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan peliputan dan dokumentasi.
7. Memeriksa data untuk bahan kajian pengembangan peliputan dan dokumentasi.

8. Menyusun rencana kegiatan kerja dan memfalisitasi pembinaan peliputan dan dokumentasi sebagai media informasi.
9. Menyiapkan dan menyusun peliputan dan dokumentasi kegiatan hubungan masyarakat.
10. Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan lingkup peliputan dan dokumentasi.
11. Menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan umum dibidang seksi peliputan dan dokumentasi oleh pemimpin.
12. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkungan pemerintah Kota Bandung, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program.
13. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program seksi peliputan dan dokumentasi sebagai bahan pertanggung jawaban kepada pemimpin.
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi Seksi peliputan :
    1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup peliputan dan dokumentasi,
    2. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup peliputan dan dokumentasi,

3. Pelaksanaan lingkup peliputan dan dokumentasi yang meliputi kegiatan eksekutif, legislative, konferensi pers, press release,
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan peliputan dan dokumentasi,
5. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup peliputan dan dokumentasi.

B. Kepala seksi kemitraan Media dan Publikasi

a. Uraian tugas seksi kemitraan dan publikasi, yaitu :

1. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang kemitraan media dan publikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
2. Menyiapkan bahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanaan secara efektif dan efisien,
3. Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana dan program sebagai bahan penyempurnaan hasil kerja dan sebagai penilaian kerja bawahan,
4. Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan kemitraan media dan publikasi,
5. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan media dan publikasi,

6. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi serta fasilitas pembangunan kemitraan media dan publikasi,
7. Memeriksa /mengoreksi data untuk bahan kajian pengembangan kemitraan media dan publikasi,
8. Mengidentifikasi dan memfasilitasi pembinaan kemitraan media dan publikasi sebagaimedia informasi,
9. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi serta fasilitas pengembangan kemitraan.
10. Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan lingkup kemitraan media dan publikasi,
11. Menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan umum di bidang kemitraan media dan publikasi oleh pimpinan,
12. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dilingkungan pemerintah kota bandung, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program,
13. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program seksi kemitraan media dan publikasi sebagai bahan pertanggung jawaban kepada pimpinan,
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi kemitraan media dan publikasi :

1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kemitraan media dan publikasi,
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup kemitraan media dan publikasi,
3. Pelaksanaan lingkup kemitraan media dan publikasi yang meliputi pengembangan kemitraan media skala kota, pemberdayaan dan pengembangan media elektronik dan cetak,
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kemitraan media dan publikasi.

1.7 Sarana dan Prasarana DISKOMINFO

1.7.1 Sarana DISKOMINFO

Sarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Sarana DISKOMINFO

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Gedung	1	**baik**
2	Ruang Staf	11	**baik**
3	Ruang Pimpinan	2	**baik**
4	Ruang Tamu	1	**baik**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
5	Perpustakaan	1	**baik**
6	Kantin	1	**baik**
7	Musholla	2	**baik**
8	Gudang	1	**baik**
9	Dapur	1	**baik**
10	Toilet	2	**baik**
11	Lapangan Upacara	1	**baik**
12	Lapangan Parkir	4	**baik**

1.7.2 Prasarana DISKOMINFO

Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Prasarana DIKOMINFO

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Meja	1	**baik**
2	Kursi	11	**baik**
3	Lemari	2	**baik**
4	Billing Kabinet	1	**baik**
5	Komputer	1	**baik**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
6	Scanner	1	**baik**
7	Printer	2	**baik**
8	Telepon	1	**baik**
9	Dispenser	1	**Baik**

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.8.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di Bidang Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung, yang beralamat di Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4230393 Bandung.

1.8.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan (30 hari kerja) yang terhitung mulai dari tanggal 04 Juli - 12 Agustus 2011. Kegiatan PKL ini dilaksanakan pada hari senin - jumat pada pukul 08.00 – 16.00 WIB.